

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada triwulan IV 2025, Provinsi Jawa Barat mengalami inflasi sebesar 0,43% (mtm), lebih rendah dibanding inflasi nasional. Berdasarkan hal tersebut maka secara tahunan inflasi Jawa Barat menjadi 2,63% (yoy). Inflasi Jawa Barat pada bulan Desember 2025 terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,31%. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi (mtm) yaitu cabai rawit sebesar 0,15%, daging ayam ras sebesar 0,08% serta telur ayam ras sebesar 0,03%. Sedangkan komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi (mtm), yaitu: cabai merah sebesar -0,05% dan jengkol sebesar -0,01%. **Di sisi lain, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga tercatat memberikan andil inflasi sebesar 0,07% (mtm)** dengan komoditas andil inflasi yaitu emas perhiasan dengan andil sebesar 0,07%,

Secara spasial, seluruh Kab/Kota pantauan IHK di Jawa Barat mengalami inflasi (yoy). Inflasi tertinggi terjadi di Kota Sukabumi sebesar 3,14% dengan IHK sebesar 110,98 sedangkan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Subang sebesar 2,11% dengan IHK sebesar 111,37. Di sisi lain, apabila dilihat secara mtm, inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Subang sebesar 0,69% dan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Majalengka sebesar 0,29%.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Sebagai upaya pengendalian inflasi di daerah, TPID Provinsi Jawa Barat memiliki program kerja strategis berdasarkan *roadmap* pengendalian inflasi di daerah. Adapun permasalahan yang dihadapi terkait fluktuasi harga yang terjadi selama triwulan-IV 2025 yaitu:

1. Harga beras di sejumlah wilayah menunjukkan tren penurunan pada berbagai kelas kualitas;
2. Permintaan telur ayam mengalami peningkatan untuk memenuhi kebutuhan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah;
3. Kenaikan harga daging ayam ras dan telur ayam ras akibat meningkatnya jumlah permintaan menjelang Nataru;
4. Cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah berdampak signifikan pada pasokan komoditas hortikultura, terutama sayuran dan cabai;
5. Harga emas dunia masih menunjukkan tren peningkatan hingga Triwulan IV;
6. PT Pertamina Persero melakukan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak Non Subsidi jenis Pertamina Series dan Dex Series per 1 Desember 2025;
7. Operator jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) menggelar diskon tarif tol sejak 13 Oktober 2025 dan diskon tiket transportasi secara nasional pada masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka menjaga laju inflasi agar selalu berada dalam *range* target yang telah ditetapkan, TPID Provinsi Jawa Barat telah menyelenggarakan beberapa kegiatan sebagai

berikut yaitu sbb:

1. Rapat Koordinasi Dwimingguan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat sebanyak 3 kali selama Triwulan IV;
2. *Capacity Building* Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada Triwulan IV Tahun 2025 dilaksanakan sebanyak 3 kali, antara lain:
 - a. *Capacity Building* Pemenang PINUNJUL Award Tahun 2024 dilaksanakan di Kota Madiun dan Kab. Blitar pada 16 – 17 Oktober 2025
 - b. *Capacity Building* dengan Tema “Penguatan Model Bisnis dan Ekosistem BUMD Pangan dan BUMP Jawa Barat” dilaksanakan di Kota Bandung pada 11 -12 November 2025.
 - c. *Capacity Building* menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru dilaksanakan di Kabupaten Garut pada 9 Desember 2025;
3. Pelaksanaan PINUNJUL Award sebagai bentuk Apresiasi dan Motivasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada 27 Kabupaten/Kota;
4. Rapat Koordinasi menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru dilaksanakan pada 5 Desember 2025;
5. Rapat Koordinasi pengelolaan kotoran hewan sebagai bentuk *integrated farming*;
6. Rapat Koordinasi Penguatan Kolaborasi Ekosistem Ekonomi Pertanian Organik pada 4 Desember 2025;
7. Rapat Koordinasi Distribusi Minyakita pada 23 Desember 2025;
8. Penyusunan Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan Tahun 2025;
9. Penelaahan Teknis dan Koordinasi Kebijakan terkait Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut.
10. Pendampingan kepada Kabupaten/Kota;
11. Pemantauan Harga Pangan di 81 Pasar oleh Kabupaten/Kota setiap hari yang disajikan dalam SILINDA JABAR;
12. Pertemuan Penyampaian Laporan Perkembangan Harga Komoditas Pangan Strategis serta Upaya Pengendalian Inflasi oleh Tim Teknis Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah Jawa Barat (SILINDA JABAR) sebanyak 3 kali selama Triwulan IV;
13. Survei Harga Pangan Strategis di Pasar 27 Kabupaten/Kota yang dilaksanakan setiap bulan;
14. Interoperabilitas Aplikasi SILINDA JABAR dengan Aplikasi Pemantauan Harga di Kabupaten/Kota;
15. Pengelolaan CPPD oleh BULOG per 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. CPPD Provinsi sebesar 2.654,28 ton beras dan
 - b. CPPD Kabupaten/Kota antara lain:
 - Beras: 3.370,16 ton
 - Gabah: 36,16 ton
 - Gula Pasir: 26,50 ton
 - Telur ayam: 37,38 ton
 - Daging Sapi: 0,63 ton
 - Minyak Goreng: 1117,76 KL
16. Pelaksanaan OPADI pada 16 – 18 Desember 2025 di 27 Kabupaten/Kota;
17. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah sampai dengan Desember 2025 sebanyak 1.861 kali;
18. Mobil Pangan Keliling Jawa Barat (Mobil Paling Jawara) dilaksanakan sebanyak 50 kali;

19. Penyerapan Gabah/Beras PSO sampai dengan 31 Desember 2025 sebanyak 552.322 Ton;
20. Pengadaan Jagung PSO sampai dengan Desember 2025 sebanyak 2.378 ton;
21. Penyaluran beras SPHP hingga Desember 2025 sebanyak 73.940.930 Kg;
22. Penyaluran bantuan pangan beras periode Oktober - November 2025 sebanyak 66.849.860 Kg;
23. Fasilitasi Distribusi Pangan sebanyak 687.500 Kg;
24. Optimalisasi distribusi pangan di 120 Kios Pangan;
25. Gelar Produk Pasar Tani sampai dengan September 2025 sebanyak 21 kali;
26. Pasar Leuwung sampai dengan 20 Desember 2025 sebanyak 8 kali;
27. Pasar Tani sampai 7 Desember 2025 dilaksanakan sebanyak 21 kali;
28. Gerakan tanam cabai di kabupaten sentra dan non sentra;
29. Optimalisasi penggunaan *greenhouse* untuk budidaya cabai;
30. Monitoring Sistem Peringatan Dini dan Pengelolaan Tanam Hortikultura (EWS SIPANTARA) terutama dalam memitigasi dampak perubahan iklim serangan OPT dan Jadwal Tanam;
31. Pemberian Bantuan Benih Padi Inbrida Bersertifikat untuk para petani terdampak banjir dilaksanakan di Kabupaten Ciamis dan Pangandaran;
32. Pengembangan komoditas tanaman cabai dan bawang merah melalui optimalisasi peran Petani Andalan dan Petani Champion;
33. Konservasi Lahan di DAS Citarum dengan Metode Teras Bangku pada Kawasan Hortikultura di DAS Citarum.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa kegiatan pengendalian inflasi yang telah dilakukan oleh TPID Jawa Barat secara umum berdampak dalam menekan laju inflasi. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi ke depannya seperti:

1. Harga beras masih menjadi andil inflasi meskipun produksi meningkat, dipengaruhi oleh tingginya Margin Pengangkutan dan Perdagangan (MPP) dan berkurangnya stok di penggilingan swasta;
2. Cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah berdampak signifikan pada pasokan komoditas hortikultura, terutama sayuran dan cabai;
3. Peran kios pangan murah yang secara intervensi masih belum efektif;
4. Tekanan harga komoditas sayur-mayur dan protein hewani meningkat seiring lonjakan permintaan MBG dan menjelang periode Hari Besar Keagamaan Negara (HBKN);
5. Kenaikan harga berbagai bahan baku dan BBM berdampak terhadap meningkatnya

biaya produksi sehingga dapat meningkatkan harga komoditas;

6. Ketergantungan terhadap komoditas pangan impor, seperti bawang putih, jagung, gandum, gula pasir, dan lain-lain;
7. Peran BUMD pangan sebagai *offtaker* belum optimal, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota;
8. Kapasitas produksi di beberapa sentra masih bervariasi, sehingga pada saat permintaan meningkat, kemampuan *supply* belum mampu menahan lonjakan harga. Di samping itu, penggunaan teknologi pasca panen d/r hilirisasi pangan dan pengurangan *food loss* masih terbatas;
9. Pemanfaatan Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) selain untuk Operasi Pasar dan intervensi distribusi berbasis data *real-time* belum optimal;
10. Edukasi mengenai diversifikasi dan substitusi pangan belum diikuti perubahan pola konsumsi masyarakat. Meski upaya sosialisasi telah dilakukan, preferensi masyarakat masih sangat kuat pada pangan segar dan konvensional.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Langkah kebijakan yang diambil oleh TPID Provinsi Jawa Barat dalam pengendalian inflasi selama periode Triwulan-IV 2025 di antaranya :

1. Optimalisasi peran BUMD Pangan sebagai *offtaker* untuk memotong rantai distribusi serta integrasi dengan kios pangan agar pasokan lebih stabil dan harga intervensi lebih konsisten;
2. Pendataan kebutuhan SPPG beserta alokasi waktu secara terukur, serta penyediaan *cold storage* di sentra produksi untuk menahan surplus komoditas pada saat panen raya;
3. Penguatan mandat BUMD sebagai *offtaker* utama komoditas strategis melalui penyerapan di sentra, penyimpanan, dan distribusi ke kota *deficit*;
4. Pendampingan manajemen budidaya untuk meningkatkan produktivitas di wilayah sentra, didorong oleh penyediaan alsintan/teknologi pasca panen;
5. Perluasan pemanfaatan FDP untuk kegiatan lain seperti distribusi ke kios pangan maupun untuk distribusi d/r KAD saat harga tinggi dan daerah surplus-defisit;
6. Penyusunan materi edukasi yang lebih aplikatif, termasuk resep, perbandingan harga, dan manfaat gizi pangan alternatif terutama dalam pemanfaatan komoditas pangan khas lokal;
7. Industrialisasi melalui penguatan sektor pertanian, peternakan, koperasi, dan BUMDes untuk menjamin ketersediaan serta kelancaran pemenuhan kebutuhan komoditas untuk program MBG;
8. Pengendalian harga tarif angkutan (darat, laut, udara) sesuai kewenangan daerah;
9. Pengamanan logistik angkutan barang akibat bencana maupun dampak dari pembatasan angkutan barang menjelang HBKN;
10. Peningkatan upaya mitigasi dan optimalisasi penanggulangan bencana melalui Koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Penguatan koordinasi lintas sektor melalui wadah TPID.